



# Buletin **Parlementaria**

Nomor 982/IV/X/2017 • Oktober 2017



**Sidang IPU ke 137  
Terima Resolusi Rohingya**

**RUU Ekraf Untuk  
Payungi Kreatifitas**

## **Pengembangan Panas Bumi Turki Bisa Diterapkan di Indonesia**

**TIDAK  
DIPERJUAL  
BELIKAN**

# Pengembangan Panas Bumi Turki Bisa Diterapkan di Indonesia

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menegaskan, Indonesia dapat mencontoh Turki dalam mengembangkan panas buminya. Pasalnya, Pemerintah Turki mampu meningkatkan potensi Geothermalnya dari kapasitas terpasang 160 MW melesat menjadi 1000 MW.

“Kunjungan ke Zorlu Energy Geothermal Power Plant, dapat dijadikan alat pembelajaran agar pengelolaan panas bumi di Indonesia menjadi lebih baik. Jadi, apa yang dicapai Turki ini bisa diterapkan di Indonesia yang saat ini pengembangan panas buminya masih tertatih-tatih,” kata Ketua Delegasi DPR RI Agus Hermanto usai melakukan pertemuan dengan Direktur Utama Zorlu Energy di Kizildere, Turki, Rabu (11/10).

Agus menjelaskan, jika dibandingkan dengan Turki, kapasitas Geothermal di Indonesia sejatinya jauh lebih tinggi. Namun percepatan dan adopsinya sangat lambat. “Percepatan hasil panas bumi di Turki ini harus diamati serta dipelajari untuk dapat diadopsi di Indonesia,” tambahnya.

Menyinggung hasil pertemuan dengan pihak Zorlu Energy, Agus mengatakan delegasi DPR telah mendapatkan banyak informasi baik itu mengenai harga, kontrak, dan masalah-masalah teknis lainnya yang berkaitan dengan

pengembangan geothermal ini. “Tentunya kami juga harus lebih banyak mengetahui lagi dari negara-negara lainnya agar kita bisa menerapkannya di Indonesia untuk mencapai kemandirian energi terutama di panas bumi,” tegasnya.

Walaupun sumber-sumber lainnya, seperti angin dan air tetap dikembangkan. Selama ini, Indonesia masih fokus pada sumber energi fosil minyak dan batu bara yang sebagaimana diketahui sebentar lagi akan habis.

Menurutnya, energi geothermal ini merupakan energi yang menjanjikan dan kita sebagai pewaris harta karun sumber daya alam yang jika tidak memanfaatkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara rasanya tidak lengkap. Sehingga kita harus menguatkan geothermal ini.

Dalam kesempatan tersebut, politisi dapil Jateng ini menjelaskan, kepada Zorlu jika ingin berinvestasi di Indonesia tidak perlu melalui Singapura seperti

selama ini, tapi langsung dengan Jakarta. “Kami yakini kunjungan ke Turki benar-benar bermanfaat tidak hanya menjalin hubungan antara kedua parlemen saja tetapi juga kerja sama di bidang ekonomi khususnya energi panas bumi ini,” tutupnya.

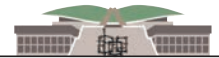
Sebagaimana diketahui, Indonesia memiliki potensi panas bumi (geothermal) sebesar 30 GW, namun saat ini kapasitas terpasang baru sekitar 1700 MW atau 5 persen dari total potensi. Sementara, energi panas bumi di Turki pada tahun 2014 kapasitas terpasang baru sekitar 160 MW, namun sekarang kapasitas terpasangnya sudah mencapai 1000 MW.

Untuk informasi, Zorlu Energy Geothermal Power Plant ini adalah yang terbesar di Turki, sehingga ini alasan mengapa DPR melakukan kunjungan ke Turki karena hasil panas bumi di Turki dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan tajam. ■

(sua) / Foto: Sucahri



Delegasi Muhibah DPR RI dipimpin Wakil Ketua DPR/Korinbang Agus Hermanto Meninjau Ruang Kendali Zorlu Energy di Denizli, Turki.



# Sidang IPU ke 137 Terima Resolusi Rohingya

Setelah memenangkan voting dengan 1.027 dukungan dalam sidang ke-137 Inter Parliamentary Union (IPU), proposal Emergency items terkait krisis Rohingya yang diusulkan oleh delegasi parlemen Indonesia, berhasil diadopsi menjadi resolusi sidang IPU ke-137.

**M**erespon diadopsinya krisis Rohingya ke dalam resolusi IPU, Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Delegasi Parlemen Indonesia Fadli Zon menegaskan bahwa isu kemanusiaan di Rakhine sangat krusial sehingga harus dibela. "Bagi Indonesia, krisis kemanusiaan di Rakhine sangat krusial dan fundamental, karena menyangkut nilai-nilai universal yang harus dibela," ujar Fadli Zon Senin, (16/10).

Karenanya, DPR memiliki sikap konsisten terhadap krisis Rohingya, sehingga hal ini perlu mendapatkan perhatian dari forum parlemen dunia. "Sebab itu, Parlemen Indonesia memiliki sikap yang konsisten terhadap krisis Rohingya. Bahwa isu ini, membutuhkan



Wakil Ketua DPR/Korpolkam Fadli Zon foto bersama delegasi DPR dalam sidang IPU ke 137 di Rusia

dan harus mendapatkan perhatian resmi dari forum parlemen. Baik itu forum parlemen regional AIPA, APA, dan juga saat ini IPU. Sebab itu, kita mengajukan isu Rohingya sebagai emergency items untuk dimasukkan ke dalam resolusi IPU," jelas Fadli.

Diterimanya isu Rohingya ke dalam resolusi IPU, menjadi bukti bahwa IPU sebagai forum parlemen dunia benar-benar hadir, tidak menutup mata dan telinga, saat krisis kemanusiaan tengah berlangsung di salah satu kawasan di dunia.

"Penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine akan lebih cepat tercapai jika ada dorongan IPU sebagai representasi anggota parlemen dunia. Itu sebabnya melalui IPU, Indonesia bersama Bangladesh, Turki, Irak, Iran, Sudan, Maroko, dan Uni Emirat Arab, mendorong agar isu Rohingya masuk menjadi salah satu resolusi di IPU. Dan upaya tersebut kini berhasil," papar Fadli Zon.

Meski demikian, dalam voting di IPU terhadap isu Rohingya, sayangnya beberapa negara anggota ASEAN seperti Myanmar, Singapura, Laos, dan Kamboja, menolak krisis Rohingya untuk dimasukkan ke dalam resolusi IPU.

"Diterimanya isu Rohingya sebagai resolusi IPU ke-137, sekaligus menjadi catatan penting bagi forum parlemen regional seperti AIPA, yang tidak memberikan sikap apapun terhadap krisis Rohingya. Padahal permasalahan tersebut terjadi di halaman kita sendiri," jelas Fadli,

Bagi Politisi Gerindra ini, masukannya krisis Rohingya dalam resolusi IPU ini menjadi koreksi bagi sikap parlemen ASEAN dan negara-negara ASEAN yang justru pasif dan menutup mata terhadap krisis di Rohingya. ■

(ns.sc) foto: dokandri

- PENGAWAS UMUM**  
Pimpinan DPR RI
- WAKIL KETUA PENGARAH**  
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Persidangan)
- PIMPINAN PELAKSANA**  
Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)
- PIMPINAN REDAKSI**  
Drs.Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)
- WK. PIMPINAN REDAKSI**  
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),  
Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis),  
Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)
- REDAKTUR**  
Mastur Prantono, Suciati, S.Sos
- SEKRETARIS REDAKSI**  
Hasri Mentari, Guntur Dewanto
- ANGGOTA REDAKSI**  
Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen,  
Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patulli, Devi Iriandi, Hendra  
Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega
- REDAKTUR FOTO**  
Eka Hindra, Iwan Armanias
- FOTOGRAFER**  
Soepardi, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,  
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief  
Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni, Akza Restu Fadilah
- ADMINISTRASI FOTO**  
Bagus Mudjiharijanto
- ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA**  
Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI  
Gedung Nusantara II Lt. 3  
Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta  
Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,  
e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com, www.dpr.go.id/berita



## PENERBITAN

- PIMPINAN PENERBITAN**  
Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan)
- PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI**  
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)
- STAF PRODUKSI**  
Subadri, S.E, Barliansyah,  
Fathurrahman, Abdul Kahfi, S. Kom
- DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Drs. Karyanto (Kasubag Distribusi)
- ADMINISTRASI**  
Sjaefudin, S.Sos
- KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Mujiono
- PHOTOGRAFER ART**  
Friederick Munchen
- STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Arif, Lamin, Remon,  
Yuliana Puspita, Ifan, Izzi Fauzul Umam  
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421  
Email : penerbitandpr@gmail.com

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN



Ketua DPR Setya Novanto (tengah) meresmikan akses air bersih untuk pengungsi Gunung Agung didampingi oleh AA Bagus Adi Mahendra (kanan)



## Ketua DPR Resmikan Akses Air Bersih Untuk Pengungsi Gunung Agung

Setelah sebelumnya mengunjungi pengungsi di Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Ketua DPR Setya Novanto melanjutkan kunjungan ke beberapa posko pengungsian di Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karang Asem, Bali.

**D**i lokasi tersebut, Novanto meresmikan akses air bersih yang diinisiasi Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, AA Bagus Adi Mahendra. Ia pun berharap air bersih ini bisa digunakan bagi para pengungsi dalam kegiatan sehari-harinya. "Insya Allah air bersih ini menjadi berkah bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan anak-anak bisa gunakan untuk mandi, cuci, dan berbagai kegiatan dapur," kata Novanto, Jumat, (13/10).

Selain air bersih, Setya Novanto yang didampingi Wakil Gubernur Bali Sudikerta juga memberikan bantuan sembako dan logistik lainnya. Novanto juga mencatat kebutuhan lain yang diperlukan warga. Ia pun menegaskan akan terus koordinasi dengan BNPB untuk memastikan penyaluran bantuan agar terlaksana dengan baik.

"Tadi warga bilang masih membutuhkan kasur, bantal, dan guling. Karena khawatir masa pengungsian masih lama. Saya harap Pak Wagub bisa segera memenuhi kebutuhan tersebut. Saya di pusat juga selalu berkoordinasi dengan BNPB maupun kementerian terkait untuk memastikan penyaluran bantuan dari berbagai sumber terlaksana dengan baik," kata Novanto.

Menyambut ucapan Novanto, Wakil Gubernur Bali Sudikerta mengatakan memang ada kekhawatiran masa pengungsian berlangsung lama, karena itu akhir minggu ini kasur, bantal, dan guling

sudah siap. Minggu depan langsung didistribusikan ke posko-posko pengungsian.

"Sejauh ini, kami sudah menyalurkan bantuan beras lebih dari 5 ton, 2.000 paket sembako, sarana dan prasarana air bersih untuk MCK dan keperluan dapur. Tak hanya untuk keperluan warga, pakan ternak juga selalu didistribusikan. Pekan ini saja sudah lebih dari 5 truk yang tersalurkan," kata Wakil Gubernur Bali Sudikerta.

Tak hanya itu, Novanto juga secara simbolik memberikan bingkisan perlengkapan mandi balita. Ini sebagai wujud perhatian dirinya terhadap korban pengungsian Gunung Agung. "Supaya tetap sehat dan bersih, anak-anak kita yang masih balita perlu perhatian khusus, terutama dalam sarana dan prasarana mandinya," tutur Novanto.

Diakhir pertemuannya ini, Novanto menegaskan bahwa dirinya akan selalu bersama para pengungsi, sehingga diharapkan pengungsi Gunung Agung tidak perlu cemas karena pemerintah pusat dan daerah akan saling sinergi dalam memberikan bantuan.

"Bapak, Ibu dan saudara-saudara tidak sendirian menghadapi ini semua. Ada saya, Pak Wagub Sudikerta, Pak Mahendra dan para anggota DPR RI, serta banyak lagi yang lainnya. Kita semua bersaudara, akan saling membantu dan tolong menolong. Duka Bapak Ibu, duka kita bersama. Kebahagiaan Bapak Ibu, juga kebahagiaan kita bersama," tutup Novanto. ■

(ns), foto/jaka/ri

# DPR Dorong Penguatan Anggaran Riset dan Beasiswa Bidikmisi

Dewan Perwakilan Rakyat mendorong Pemerintah, khususnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) untuk memberikan dukungan anggaran di bidang riset dan penguatan program beasiswa Bidikmisi untuk mahasiswa. Hal ini untuk menjawab tantangan global dan kecepatan alih teknologi saat ini yang semakin maju.

**W**akil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengakui, saat ini zaman sudah berubah. Hal itu ditandai dengan sudah cukup majunya kecepatan alih teknologi informasi, atau yang biasa disebut dengan transformasi kultural. Untuk menjawab tantangan itu, Taufik mendorong Universitas Diponegoro (Undip) agar bisa lebih awal membuka jurusan yang implementatif, yang siap untuk diterima bekerja di dunia profesional.

Hal itu diungkapkannya pada Puncak Perayaan Dies Natalis ke-60 Universitas Diponegoro, di Kampus Undip, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (17/10). Acara yang bertepatan 'Menuju Undip Sebagai Universitas 500 Besar Ranking Dunia' dengan subtema 'Riset Untuk Rakyat' itu dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, jajaran Menteri Kabinet Kerja, Gubernur Jawa Tengah, hingga segenap tokoh nasional, dan ribuan mahasiswa Undip.

"DPR mendukung pernyataan Presiden Jokowi untuk Undip membuka jurusan ekonomi digital, mungkin seperti jurusan online shopping, yang sesuai dengan era digitalisasi sekarang," kata Taufik, yang juga alumni Undip. Bisa dikatakan, Taufik merupakan alumni 24 karat Undip, karena telah mengantongi ijazah S1 Teknik Kimia Fakultas Teknik Undip, S2 Manajemen Fakultas Ekonomi Undip, dan S3 Doktorat Ilmu Ekonomi Undip.

Politisi F-PAN itu menambahkan, juga mendukung untuk Undip menuju universitas berkelas dunia (world class university). Sebagai alumni Undip, Taufik pun menyisihkan waktu untuk berinteraksi dengan mahasiswa Undip melalui berbagai

program kuliah umum selama beberapa minggu terakhir. Ia mengaku, tidak bisa meninggalkan suasana kebatinan dengan Undip, karena telah menempuh pendidikan di Undip sejak Strata 1.

"Saya melihat Alumni Undip sekarang banyak berkiprah di tingkat nasional. Saya berharap ikatan alumni jangan melupakan almameter Undip. Ingat selalu almamater, untuk mengembangkan Undip lebih maju dan semakin jaya ke depan. Tanpa Undip, tentunya saya bukan siapa-siapa," harap Taufik.

Sementara itu dalam orasi ilmiahnya, Presiden Joko Widodo memberikan motivasi dan mengajak mahasiswa untuk memahami perubahan global. Mahasiswa harus mampu mengikuti arah perubahan global dan memiliki etos kerja yang tinggi. Presiden pun menghimbau universitas harus menjadi alat perubahan ke arah

teknologi. Menurutnya teknologi menjadi dasar dari berbagai bidang di era modern.

"Mahasiswa harus punya jiwa kreatif, dan paling penting anti korupsi. Sekarang ini masyarakat Indonesia sudah mulai meninggalkan hal-hal konvensional seperti toko konvensional, dan beralih ke online. Pesan makanan sekarang bisa lewat online," imbuh Presiden.

Presiden berharap agar universitas mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan menciptakan inovasi-inovasi yang berguna bagi masyarakat luas. Menurutnya, SDM adalah kunci utama menghadapi perubahan. Tanpa SDM yang kuat, Indonesia tidak akan mampu bersaing dengan negara lain.

"Di Kabinet Kerja, ada dua menteri yang merupakan alumni Undip, yaitu Menristekdikti Mohamad Nasir dan Mendagri Tjahjo Kumolo. Kemudian Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat, dan Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan," imbuh Presiden.

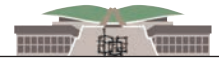
Dalam kesempatan yang sama, Rektor Undip Profesor Yos Johan Utama mengungkapkan bahwa Undip telah berada di peringkat pertama nasional dalam hal pengabdian masyarakat. Selain itu, Undip juga telah meraih peringkat 6 perguruan tinggi nasional dan ranking 102 di tingkat dunia.

"Ini sebuah prestasi yang membanggakan Undip bisa meraih peringkat pertama di Indonesia dalam hal pengabdian masyarakat. Target kami memang ingin membuat Undip sebagai kampus riset sesuai dengan tema Dies Natalis ini," harap Rektor Undip. ■

(sl/mp) foto: sofyan/hr



Wakil Ketua DPR/Korekku Taufik Kurniawan bersama civitas akademika Undip.



# Komisi III Gelar Rapat Gabungan dengan KPK, Polri, Kejaksaan dan Kemenkum HAM



Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa berjabat tangan dengan Kapolri Jend. Tito Karnavian

Komisi III DPR RI menggelar rapat gabungan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diketuai Agus Rahardjo, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, Kapolri Tito Karnavian, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/10). Agenda yang dibahas diantaranya terkait pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pemberantasan pidana korupsi oleh masing-masing penegak hukum, dan pola serta koordinasi antara aparat penegak hukum.

**W**akil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa selaku ketua rapat mengatakan, catatan yang dinilai penting, bahwa saat ini agak susah menuju negara bebas korupsi secara konkret. Hal ini terjadi karena kementerian dan lembaga yang korupsi, sampai hari ini, tidak memiliki antibody yang bisa menjadi contoh atau pilot project penindakan korupsi bagi KPK.

“Poin ini penting bagi kita, untuk mengevaluasi catatan-catatan tentang apa yang terjadi hari ini, apa dan yang ke depan harus kita lakukan. Apakah ada kekurangan peraturan yang tidak mendukung, ada efek jera yang tidak maksimal, atau ada persoalan edukasi pencegahan terhadap korupsi yang tidak maksimal,” jelas politisi F-Gerindra itu, di sela-sela rapat gabungan.

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menambahkan, harus disepakati semangat dan sikap permanen bahwa dalam sistem peradilan pidana atau *criminal*

*justice system*, berlandaskan pada Pasal 1 Ayat 3 dan Pasal 27 UUD 1945, bahwa Polri dan Kejaksaan Agung merupakan inti daripada penegakan hukum Indonesia.

“Lembaga tinggi negara lainnya, seperti KPK dan Komnas HAM untuk membantu dan mendukung penegakan hukum, bukan untuk mengganti inti lembaga negara tersebut,” imbuh politisi F-PG itu.

Berikutnya, masih kata Bambang, tugas yang diamanatkan dalam UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK kepada KPK, harus menjadi landasan untuk mewujudkan tugas dan fungsinya dilaksanakan dengan baik, dan diselesaikan dengan baik.

Terkait poin di atas, Bambang menilai, tampaknya fungsi utama KPK sebagai *trigger mechanism*, telah dilaksanakan dengan baik. Meskipun sifat-sifat koordinasi masih belum maksimal. Tetapi sebagaimana sifat dan sistem demokrasi, akan melahirkan pelaksanaan anti korupsi secara otomatis oleh sistem inti yang ada, termasuk Kepolisian dan Kejaksaan.

“Oleh sebab itu, kami menganggap penting rapat gabungan hari ini. Saya yakin tidak cukup 1 kali pertemuan ini, dan akan kita lanjutkan pada rapat-rapat berikutnya, agar agenda pemberantasan korupsi berada dalam satu draft langkah, yang tepat diantara pemangku kepentingan penegak hukum, Kepolisian, Kejaksaan dan KPK,” jelas politisi asal dapil Jateng itu.

Wakil Ketua DPR RI Benny K. Harman mempertanyakan, apakah Kepolisian dan Kejaksaan Agung sudah siap dan selesai dibangun, dan bertugas memberantas korupsi. Pasalnya, indeks korupsi semakin meningkat. Penindakan korupsi tidak hanya bisa mengandalkan KPK. Menurutnya, Densus Tipikor bisa menjadi jawaban kegelisahan atas hal ini.

“Kepolisian dan Kejaksaan perlu membentuk Densus di internal masing-masing dengan KPK sebagai supervisi dan koordinasi. Mengapa KPK sebagai koordinasi dan supervisi, karena untuk memastikan penanganan korupsi berlangsung transparan, akuntabel dan fokus,” jelas politisi F-PD itu.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, pemberantasan korupsi tidak berhenti, dan tidak berjalan di tempat. Tetap berjalan, meskipun belum signifikan.

Menurut Agus, sejak 1999 selepas Orde Baru tingkat pemberantasan korupsi di Indonesia, berada di tingkat paling bawah di Kawasan Asia Tenggara. “Kita (dulu) di bawah Thailand, Vietnam, dan Filipina,” imbuh Agus.

Sementara itu, Jaksa Agung Muhamad Prasetyo berharap Kejaksaan Agung memiliki kesetaraan yang sama dengan penegak hukum lainnya seperti Polri dan KPK, sehingga penegakan hukum dapat berlangsung efektif.

“Terkait pembentukan Densus Tipikor, kami telah mempersiapkan dan merevitalisasi Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satgasus P3TPK),” imbuh Prasetyo.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Tito Karnavian menegaskan, kasus korupsi yang masif, tidak bisa dengan satu senjata, yakni penindakan. Setidaknya dibutuhkan tiga senjata, yakni pencegahan, penindakan, dan pasca penindakan. ■

(si,mp) foto: andrihr



Anggota Komisi I DPR Roy Suryo Notodiprojo

## BSSN untuk Antisipasi Perkembangan Teknologi Kekinian

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah ditetapkan sebagai mitra kerja Komisi I DPR RI. Anggota Komisi I DPR RI Roy Suryo Notodiprojo melihat, kehadiran BSSN diperlukan untuk menjawab kondisi perkembangan teknologi yang semakin maju dan kekinian. Apalagi, jika dikaitkan dengan dunia siber.

mampu menjalankan tugas dan kinerjanya dengan baik.

“Indonesia tidak kalah canggih SDM-nya untuk bisa mengantisipasi perkembangan soal cyber crime, terutama juga informasi yang ujungnya ke arah hoaks. Tetapi sekali lagi, ini harus rapih, dan tidak terlalu banyak lembaga atau badan yang mengurusinya itu,” pesan Roy.

Roy juga melihat perlunya koordinasi dengan lembaga dan kementerian lain yang memiliki fungsi eksekusi langsung. Misalnya, Kepolisian terkait dengan kasus siber yang menyinggung unsur hukum. “Kami dari Komisi I DPR akan selalu mengawasi kinerjanya, apalagi

jika digunakan bukan untuk kepentingan negara,” tegas Roy.

Namun, politisi asal dapil DI Yogyakarta menyayangkan, pihaknya belum bisa membahas pagu anggaran untuk BSSN, karena struktur dan nomenklatur BSSN belum terbentuk, sehingga belum ada penanggung jawabnya.

“Dan di nomenklaturnya masih ada perbedaan antara yang diusulkan dan yang sudah terdaftar adalah Lemsaneg, dan kemudian yang diusulkan perubahannya menjadi BSSN. Kami mengkritik dan menyayangkan keterlambatan pemerintah dalam mengantisipasi ini. Kesimpulannya Komisi I belum dapat membahas anggaran itu,” imbuh Roy. ■

(sif.mp) foto: runi/hr

“Kehadiran BSSN itu perlu, untuk mengantisipasi perkembangan yang terjadi sekarang. Tidak hanya sandi negara, tapi soal perkembangan dunia siber, dunia maya, hingga hoaks dan lain sebagainya,” kata Roy, usai rapat dengan Lembaga Sandi Negara, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/10).

Politisi F-PD itu optimis, dengan sumber daya untuk mendukung BSSN yang terdiri dari 95 persen lebih unsur Lemsaneg dan unsur Kementerian Komunikasi dan Informatika, BSSN

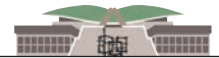
## Komisi V Desak Pemerintah Permudah KPR Bagi Pekerja Informal



Wakil Ketua Komisi V DPR Sigit Sosiantomo

Komisi V DPR RI mendorong pemerintah untuk mempermudah skema pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) disektor informal yang sampai saat ini masih kesulitan mengakses perbankan. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo mengungkapkan hal itu, menyusul masih banyaknya MBR sektor informal yang kesulitan mengakses perbankan untuk mendapatkan kredit rumah.





# Komisi IV Harap Revisi UU Karantina Segera Rampung

Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo berharap revisi UU NO 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dapat segera diselesaikan dan disahkan. Hal tersebut diungkapkannya dalam rapat kordinasi Komisi IV DPR dengan Sekjen Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Perwakilan Sekjen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di ruang rapat Komisi IV, Senayan, Jakarta, Kamis (12/10).



Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo

“Pembahasan revisi Undang-undang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan sebenarnya sudah hampir selesai, tinggal satu hal yang masih belum menemukan kesepahaman antara DPR dan pemerintah, yakni tentang pembentukan Badan Nasional Karantina. Yakni badan khusus karantina yang berdiri sendiri,” ujar Edhy.

Edhy menambahkan selama ini Karantina hewan dan tumbuhan berada

di dalam tiga instansi, yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal itu menyulitkan dalam proses karantina masuknya hewan, ikan dan tumbuhan ke dalam negeri, mengingat tiga instansi tersebut tidak secara khusus menangani masalah karantina.

Oleh karena itu DPR, mengusulkan agar karantina berada dalam satu pintu (lembaga

atau badan) yang khusus menangani karantina. Dengan demikian karantina menjadi pihak terdepan dan utama dalam perlindungan terhadap hewan, ikan dan tumbuhan dalam negeri.

Sementara itu pemerintah tidak menyetujui hal terkait kelembagaan yang ada pada Bab 10 revisi undang-undang tersebut mengingat kewenangan pembentukan kelembagaan pemerintah merupakan kewenangan Presiden sesuai dengan UU No.39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Maka pengintegrasian kelembagaan tersebut diserahkan kepada Presiden.

Permasalahan penambahan anggaran sempat mencuat menyusul usulan pembentukan badan atau lembaga khusus karantina tersebut. Terkait hal itu, Edhy mengatakan bahwa penambahan anggaran merupakan sebuah konsekuensi logis dari pembentukan lembaga atau badan baru. Namun yang terpenting hewan dan tumbuhan dalam negeri terlindungi. Dan pada akhirnya ketahanan pangan dalam negeri pun ikut terlindungi, mengingat hewan dan tumbuhan menjadi dua sumber utama makanan pokok di Indonesia. ■

(Ayu,mp), Foto: Kresno/hr

“Sebenarnya pemerintah sudah memberikan beberapa fasilitas untuk MBR berupa pemberian Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Subsidi Bunga Kredit Perumahan (SSB), Subsidi Bantuan uang Muka (SBUM). Namun, masih banyak MBR yang hingga kini kesulitan mengakses bantuan itu terutama, mereka yang bekerja di sektor informal. Penghasilannya yang tidak tetap membuat mereka sulit untuk menembus syarat-syarat mendapatkan akses pembiayaan itu,” kata Sigit Sosiantomo dalam rilis yang diterima Parlemen, Senin (16/10).

Akibatnya, masyarakat yang tidak mampu memiliki rumah terpaksa tinggal berdesakan dengan anggota keluarga yang lain di rumah keluarga besar, menumpang di rumah teman, kost, mencari rumah murah yang jauh dari lokasi kerja, membangun rumah sendiri

secara bertahap atau bahkan ada yang terpaksa tinggal di kawasan kumuh atau di kolong jembatan.

Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), kata Sigit, baru 2,5 persen pekerja sektor informal yang menikmati Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sejak program Satu Juta Rumah meluncur pada 2015 lalu. Peserta dari pekerja informal ini pun adalah hasil binaan perbankan syariah yang baru mendapatkan kemudahan KPR setelah sekitar satu atau dua tahun sudah menciil.

“Fasilitas pembiayaannya sudah banyak, tapi tidak bisa diakses. Karena itu, perlu skema pembiayaan baru bagi MBR kategori pekerja informal. Saya juga berharap keberpihakan perbankan pada sektor perumahan khususnya pembiayaan perumahan untuk sektor

informal bisa lebih ditingkatkan,” kata Sigit.

Seperti diketahui, keberpihakan perbankan pada MBR juga masih sangat rendah. Rasio penyaluran KPR terhadap PDB Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan negara tetangga, Singapura yang porsi pembiayaannya mencapai 53%, Malaysia yang mencapai sekitar 30 persen dan Thailand 15%. Sementara di Indonesia baru mencapai sekitar 8 persen. Sisanya, kebanyakan di infrastruktur dan SDA, padahal perumahan juga mendesak.

Berdasarkan data terakhir Bank Indonesia, penyaluran KPR dan KPA hingga Mei 2017 baru mencapai Rp 377,3 triliun. Penyaluran KPR tersebut baru mencapai 8,5 persen dari total penyaluran kredit perbankan. Dan penyaluran KPR ini hanya didominasi oleh 10 bank besar. ■

(hs/sc) foto: eno/hr

# PIP Disarankan Menggunakan Data Peserta Program KUBE

Wakil Ketua Komisi XI DPR Soepriyatno menyarankan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang telah ditunjuk Kementerian Keuangan, sebagai pelaksana program pembiayaan Ultra Mikro (UMI), agar berkoordinasi dengan Kemensos menggunakan data peserta Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

“Program KUBE yang dimiliki Kemensos ini kan dananya ratusan trilyun, dan sudah berjalan lama. Sehingga sudah memiliki pemetaan data, mereka yang telah berhasil pada program KUBE, maka bisa diberikan pembiayaan ultra mikro, lalu bisa berlanjut program KUR,” kata Soepriyatno saat memimpin Tim Kunjungan Komisi XI DPR, rapat dengan PIP di Bali, Senin (16/10).  
la melanjutkan, dengan begitu tidak

perlu lagi mengeluarkan dana untuk survei data yang berhak menerima pembiayaan ultra mikro. Menurutnya, hal tersebut lebih efisien agar program ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

“Saya meminta kepada PIP, dana Rp. 1,5 triliun ini di jaga kehati-hatiannya. Jangan diberikan kepada sembarangan kelompok, kalau perlu berikan kepada mereka yang sudah teradministrasi dengan baik ditingkat desa, kita doakan



Wakil Ketua Komisi XI DPR Soepriyatno

program ini berhasil,” harap Politisi Dapil Jatim itu.

Menurut Politisi F-Gerindra ini, jangan sampai seperti salah satu BUMN yang diberikan PMN sekitar Rp. 3 triliun, namun mengalami kerugian. Padahal tidak ada bunga, jangan sampai dana APBN yang diperuntukkan rakyat menjadi bancakan. ■

(ikmp).Foto: Jaka andri

# PIP Diharapkan Turunkan Suku Bunga Pembiayaan UMi

Anggota Komisi XI DPR Willgo Zainar berharap program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang berasal dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dapat diturunkan suku bunganya, sehingga lebih banyak lagi masyarakat yang memanfaatkan pinjaman ini.



Anggota Komisi XI DPR Willgo Zainar saat meninjau masyarakat pra sejahtera.

“Kalau meminjam Rp. 2 juta, maka akan mengembalikan Rp 2.250.000, itu artinya sekitar 12,5% dan dalam waktu 6 bulan. Ini juga menjadi catatan kita kalau dari sisi pembandingan dengan KUR ini lebih mahal. Tetapi ini memang dana yang untuk masyarakat pra sejahtera hanya modal KTP dan sedikit usaha,” ujar Willgo dalam Kunjungan Spesifik Komisi XI ke Padang, Senin (16/10).

Menurut kesaksian masyarakat pada saat Komisi XI DPR meninjau penduduk setempat memang sangat mudah untuk mendapatkan pinjaman lunak ini. Mereka yang memiliki kategori sebagai masyarakat pra sejahtera dan ibu-ibu yang mau memiliki usaha direkrut oleh petugas yang memang menjadi koordinator.

“Bisa dari komunitas atau kelompok tertentu, karena bagian dari pada proses ini juga melalui kelompok. Satu kelompok ada sekitar 8 sampai 16 orang, dan mereka tepat waktu karena mereka



juga sudah berikrar dan berkomitmen, mengembalikan dalam tepat waktu dan menggunakan dana ini sebagai dana produktif untuk usaha bukan untuk konsumtif,” jelas Willgo.

Willgo juga menjelaskan ada beberapa tahapan untuk meningkatkan plafon pinjaman, mulai dari 1 juta, hingga 5 juta rupiah. Hal tersebut tergantung dari prospek

usaha yang dijalankan serta evaluasi per 6 bulan terkait dengan pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat tersebut.

Pembiayaan UMi diberitahukan baru efektif disalurkan mulai bulan Agustus 2017 terkait dengan proses persetujuan pencairan anggaran di Kemenkeu dan sudah sebanyak 22.877 nasabah yang tersebar di Provinsi Sumatera

Barat ini. Komisi XI bersama PIP yang berdampingan dengan PNM melihat secara faktual bagaimana penyaluran dana kepada masyarakat pra sejahtera berjalan dengan baik. “Diharapkan industri rumah tangga dapat lebih produktif untuk membantu masyarakat yang selama ini menggantungkan hidupnya di sektor pertanian,” tutup Wilgo. ■

(Eno,mp), Foto : eno/hr

## Pengambilan Keputusan di Parlemen Perlu Peran Masyarakat

Peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan di suatu parlemen menjadi salah satu topik dalam diskusi konferensi *Association of Secretaries General of Parliament (ASGP)* 16-18 Oktober 2017 yang dihadiri oleh 75 Sekretaris Jenderal Parlemen dunia. Sekretariat Jenderal parlemen sebagai unsur pelayanan teknis dan administratif serta keahlian mempunyai peran penting untuk memfasilitasi peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

**S**ekretariat Jenderal DPR sudah sangat baik dan akan ditingkatkan terus dalam memberikan layanan keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan di DPR RI. Demikian dikatakan Damayanti, Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal DPR RI ketika mengikuti konferensi ASGP di St. Petersburg, Rusia, Selasa (17/10).

Setjen DPR berkepentingan untuk hadir pada sidang ASGP 2017 karena dapat melihat kemajuan sekretariat parlemen negara lain. Selain itu dapat menyampaikan kemajuan yang sudah dilaksanakan sekretariat parlemen Indonesia, mempererat persahabatan dan membangun jaringan kerja antar Sekretariat Jenderal parlemen di dunia serta bertukar informasi khususnya terhadap layanan substansi kedewanan.

“Yang tidak kalah pentingnya adalah kita bisa belajar dan dan membandingkan bagaimana mengorganisir suatu kegiatan internasional dan mencontoh kepedulian masalah lingkungan. Selama konferensi

berlangsung hampir tidak ada kertas, semua bahan sudah paperless. Ini bisa kita contoh. Panitia juga sangat siap terlihat sudah ada siapa mengerjakan apa sudah sangat tertata dengan rapi,” jelas Damayanti.

Terkait dengan keterbukaan informasi, Parlemen Indonesia sangat terbuka terhadap seluruh informasi yang ada di DPR, sehingga hasil survey yang dilakukan *Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)* menyatakan DPR merupakan parlemen paling terbuka diantara negara Asia Tenggara.

Damayanti menjelaskan bahwa proses layanan Setjen DPR terhadap informasi dan komunikasi masyarakat juga sudah ada jalur proses layanannya melalui SMS pengaduan (red. 08119 44 3344), pengaduan masyarakat (red. <http://pengaduan.dpr.go.id>), layanan informasi (red. <http://pengaduan.dpr.go.id>), Whistleblowing (red. <http://ittama.dpr.go.id/wbs/input>) serta masukan masyarakat terhadap suatu RUU (red. Sistem legislasi) yang semuanya dilakukan secara online.

Tentang informasi proses pembahasan Rancangan Undang-Undang juga sudah mencantumkan



Plt. Sekretaris Jenderal DPR Damayanti

seluruh proses dalam website DPR RI, kecuali risalah rapat dikarenakan sangat besarnya file, dan itupun bisa minta melalui layanan informasi secara online. (red. <http://ppid.dpr.go.id>).

“Kita akan memberikan sosialisasi agar masyarakat dapat berperan serta memberikan masukan dalam proses pengambilan keputusan di DPR dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk memberi kemudahan masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya” tutup Damayanti. ■

(dz,mp), foto:m djazulif

# Pekerja Sosial Perlu Standarisasi

Anggota Komisi VIII DPR RI Itet Tridjati Sumarijanto mengatakan perlu ada standarisasi kemampuan atau skill bagi para pekerja sosial. Mengingat, pelbagai permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat sangat variatif dan multi-kompleks sehingga tiap-tiap kasus membutuhkan penanganan yang khusus dari ahlinya.



Suasana pertemuan Tim Kunjungan Spesifik Komisi VIII dengan Kepala Dinsos Provinsi Riau, Pekanbaru



Demikian diungkapkannya dalam Kunjungan Spesifik Panja RUU Praktik Pekerjaan Sosial di UPT Panti Pengasuh Anak Dinas Sosial Provinsi Riau, Pekanbaru, Jumat (13/10). Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk mendengarkan masukan terkait RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial dari stakeholders dan masyarakat setempat.

“Masalah sosial bukanlah masalah sederhana, tetapi multi-dimensi. Masalah sosial adalah masalah kemanusiaan yang sifatnya sangat variatif. Karena itu, yang kita perlukan bukan sembarang orang yang mengentaskan permasalahan sosial ini, namun seseorang yang berpendidikan dan *qualified* dibidangnya,” ungkap Itet.

Itet mengibaratkan dengan sistem pelayanan kesehatan yang ada, yang mana memiliki jenjang karir mulai dari tingkatan dokter umum hingga menjadi dokter spesialis. Menurutnya, hal ini juga bisa diterapkan dalam praktik pekerjaan sosial. “Mereka (pekerja sosial) tidak harus semua S1, tetapi kalau bisa dijadikan sebagai suatu profesi yang berjenjang. Seperti, di pelayanan kesehatan, ada professor, dokter spesialis, dokter umum, dibantu bidan dan perawat,” tuturnya.

Selain itu, ia menambahkan, perlu dibedakan antara pekerja sosial yang profesi dan relawan, karena dalam melakukan pelayanan sosial dibutuhkan seseorang yang mumpuni secara teori dan praktik di bidangnya.

“Di negara lain, yang namanya social worker itu suatu profesi yang jelas, sementara kalau disini, orang masih bingung tentang istilah pekerja sosial itu, apakah relawan atau betul-betul profesi,” sambung Itet.

Karena itu, lanjutnya, ia mendukung norma tersebut diatur dalam RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial. Selain untuk memberikan kepastian secara yuridis, para pekerja sosial juga akan dipilah berdasarkan spesialisasinya dan jenjang pendidikan. “Sehingga ada kepastian, saya itu megang apa sih, nantinya mereka akan lebih mendalami dan penanganannya juga lebih terarah. Sisi lain, ini akan berdampak pada pendapatan ekonomi masing-masing, semakin dibutuhkan skill tersebut, maka semakin besar penghargaan yang diberikan,” jelasnya.

“Tidak mungkin satu orang bisa menangani berbagai macam masalah, karenanya dibutuhkan spesialisasi. Kita juga tidak akan langsung mencetak sarjana-sarjana itu, tetapi mereka yang sudah berpengalaman menjadi pekerja sosial bisa kita dorong untuk kembali belajar apakah itu S1 atau S2. Disamping itu, pada saat mereka menimbah ilmu bisa memberikan kontribusi atau masukan-masukan terkait praktiknya di lapangan,” tandas politisi PDI-Perjuangan ini. ■

(ann.sc) Foto: Anne/hr

## RUU TENTANG PRAKTEK PEKERJA SOSIAL DI SULAWESI SELATAN

Makassar, 13 Oktober 2017



Wakil Ketua Komisi VIII DPR Noor Achmad saat berdiskusi dengan masyarakat yang berprofesi sebagai pekerja sosial, LSM, dan Perguruan Tinggi

# Profesi Pekerja Sosial Harus Dihargai

Peran pekerja sosial ke depan tidak hanya menjadi motivator, tetapi juga sebagai katalisator sekaligus inspirator bagi masyarakat yang sedang ditanganinya. Peran motivator, katalisator dan inspirator tersebut akan menuju pada satu ideologi besar yaitu tentang kebangsaan dan kenegaraan Indonesia, meskipun yang ditanganinya berbeda-beda.

**D**emikian dikatakan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Noor Achmad saat berdiskusi dengan masyarakat yang berprofesi sebagai pekerja sosial, LSM, dan Perguruan Tinggi dalam rangkaian acara kunjungan kerja Spesifik Panja RUU Praktek Pekerjaan Sosial Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Sulawesi Selatan, Jum'at (13/10).

"Pada akhirnya kalau masalah sosial itu bisa ditangani oleh pekerja sosial profesional, maka dari perbedaan-perbedaan yang ada itu akan mempunyai visi yang sama. Oleh sebab itu pekerja sosial harus dihargai, tidak hanya dianggap sebagai volunteer atau relawan saja, tetapi mereka betul-betul dihargai sebagai seorang profesional," tegas Noor.

Tidak seperti sekarang ini, lanjutnya,

pekerja sosial yang ada di Kecamatan hanya digaji sebesar Rp. 500 ribu. Ke depan harus ditingkatkan agar lebih dari itu. "Karena manfaat yang sangat besar dari pekerja sosial itu akan menjadi faktor-faktor perekat dan faktor yang bisa menterjemahkan apa yang menjadi keinginan sosial, dan sekaligus menjadi penggerak dan inspirator bagi pemberdayaan sosial," ucapnya.

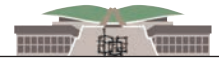
Noor menyatakan, peran pekerjaan sosial itu cukup strategis, dan pekerjaan tersebut akan sangat besar manfaatnya bagi Negara Indonesia. "Kami banyak mendapat masukan dari masyarakat Sulawesi Selatan terutama dari para pekerja sosial, LSM, dan Perguruan Tinggi mengenai substansi dari RUU Praktek Pekerjaan Sosial. Mulai dari bagaimana mereka memberikan masukan yang

terkait dengan filosofi keagamaan, sosial, dan psikologi. Mereka juga memasukan dalam konsideran-konsideran itu tentang landasan-landasan sosial dan landasan yuridisnya," papar politisi Fraksi Golkar tersebut.

Ia mengatakan bahwa Dewan sudah menampung semua aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat Sulawesi Selatan itu, dan tentu hal itu akan memperkuat dari apa yang sudah didiskusikan bersama-sama sebelumnya oleh Komisi VIII. Dari apa yang disampaikan mengenai substansi undang-undangnya, mereka juga banyak memberikan masukan-masukan mengenai batang tubuh dari undang-undangnya. Mulai dari ruang lingkup sampai pada persyaratan dari pekerja sosial itu sendiri, kualifikasi dari pekerja sosial, kemudian masuk juga dalam ranah bab pekerja sosial.

"Kalau memang pekerja sosial itu proporsional maka harus mendapat imbalan secara proporsional juga. Yang menarik juga adalah dengan adanya SDM yang berkualifikasi di bidang pekerjaan sosial maka pekerjaan sosial terkait dengan ruang lingkungannya itu harus dipertegas lagi. Diskusi yang dilakukan itu sangat inspiratif, misalnya saja pekerja sosial di masyarakat adat terpencil. Saya kira itu sangat menarik, dan ruang lingkup semacam ini akan sangat banyak sekali," pungkasnya. ■

(dep.mp) Foto : Ryan Dep/ht



# Komisi IX Selesaikan Revisi RUU Perlindungan Pekerja Migran

Setelah 10 tahun tertunda, Revisi Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PILN) akhirnya rampung dibahas Komisi IX DPR bersama dengan pemerintah dan akan dibawa ke Paripurna untuk di sahkan menjadi Undang-Undang (UU) yang selanjutnya namanya menjadi UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).

“Berbagai perdebatan, beda pendapat dan saling tarik ulur kepentingan akhirnya bisa dicarikan dan menyamakan persepsi dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia (TKI). RUU ini akan dibawa dalam sidang paripurna pada 25 Oktober mendatang,” ungkap Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf M Effendy di Gedung Nusantara I DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/10).

Dalam kesempatan itu, Dede juga menyampaikan laporan hasil Panja kepada pihak Pemerintah. Ada tujuh isu krusial yang sempat menjadi pembahasan. Pertama, mengenai pemisahan tugas dan wewenang kementerian dan badan secara tegas, mengingat permasalahan yang

selama ini ada yaitu mengenai dualisme kewenangan.

Kedua, peran pemerintah daerah. Pemda dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia dilakukan mulai dari desa, kabupaten kota dan tingkat provinsi sejak sebelum bekerja, saat mulai bekerja hingga setelah bekerja. “Pemda berperan memberikan informasi Job Order yang berasal dari perwakilan Indonesia di luar negeri. Pemda juga diminta melaksanakan Layanan Terpadu Satu Atap, dan memberikan pelatihan agar pekerja yang diberangkatkan adalah yang memiliki keahlian,” tutur legislator dari partai Demokrat itu.

Ketiga, mengenai Layanan Terpadu Satu Atap (LTSAP) dalam rangka

perlindungan pekerja migran Indonesia. LTSAP nantinya mengurus administrasi pekerja migran bersama dengan pemerintah pusat. Keempat, pelatihan vokasi melalui balai latihan kerja. Kelima, mengenai perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Dalam UU ini lebih menekankan peran lebih besar kepada Pemerintah dan mengurangi peran swasta dalam penempatan perlindungan pekerja migran Indonesia.

Keenam, mengenai Jaminan Sosial pekerja migran Indonesia yang akan dialihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai UU sistem Jaminan Sosial Nasional. Hal ini mengingat banyak persoalan klaim pekerja migran Indonesia yang mengalami kesulitan dalam proses pencairan. Terakhir, pembiayaan pekerja migran Indonesia yang akan dibebankan kepada pemberi kerja melalui perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, dalam hal ini juga akan dimasukkan sanksi pidana.

“Dalam RUU PPMI terdapat 13 BAB dan 91 pasal yang mengatur tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. RUU ini dikawal bukan hanya oleh pemerintah, namun juga LSM, masyarakat dan bahkan para pekerja migran. Alhamdulillah semoga RUU ini akan bermanfaat banyak bagi 8 juta pekerja kita yang ada di luar negeri yang akan berangkat ke luar negeri,” jelas Dede.

Dalam kesempatan itu, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan bahwasanya pemerintah memiliki komitmen yang sangat kuat untuk mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia.

“Ini sudah menjadi komitmen dasar dari pemerintah sehingga seluruh pembenahan, baik dari segi tata kelola maupun dari sisi perlindungan terus menerus ditingkatkan dan tentunya ini selaras dengan apa yang dikehendaki oleh dewan untuk memastikan kualitas pelayanan dan perlindungan TKI menjadi lebih baik,” jelasnya.

Hadirnya UU ini, lanjut dia juga menegaskan hadirnya negara dalam memberikan perlindungan yang maksimal dan pelayanan yang terbaik untuk TKI. “Terima kasih yang tak terhingga serta penghargaan kepada pimpinan komisi, anggota serta pemerintah yang telah bekerja keras menyelesaikan agenda perjuangan untuk rakyat, semoga dengan disetujui UU bisa menjadi hadiah untuk TKI dan rakyat,” tandasnya. ■



Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR berfoto bersama usai menyelesaikan revisi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri

# Pemerintah Seharusnya Tambah Anggaran Subsidi Bagi Pelanggan Listrik 900 VA

Anggota Komisi VII DPR RI Ramson Siagian mengatakan bahwa RAPBN 2018 untuk Kementerian ESDM baru mencapai finalisasi di Komisi VII dan belum ke Banggar dan Paripurna. Ramson menjelaskan, hal tersebut karena belum jelas solusi dari pemerintah mengenai masih banyaknya pelanggan listrik 900 VA yang kemampuan ekonominya lemah, tetapi terpaksa harus membayar harga keekonomian.

“Seharusnya pemerintah menambah anggaran subsidi, karena pelanggan listrik 900 VA yang ada di lapangan, yakni sekitar 35 persen lebih dari 22 juta pelanggan adalah rakyat kecil,” ucap Ramson di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/10).

Ramson menyatakan, Fraksi Partai Gerindra sangat konsen akan kepentingan rakyat kecil itu, dan menginginkan agar pemerintah menganggarkan anggaran untuk masalah tersebut.

“Tetapi sampai saat ini belum ada solusi. Karena nyatanya baru 4,1 juta yang merasakan hal itu di lapangan. Padahal banyak keluhan di masyarakat. Karena belum ada solusi mengenai hal itu, maka kami di Komisi VII dari Fraksi Partai Gerindra menolak RAPBN 2018 untuk Kementerian ESDM. Kita menunggu



Anggota Komisi VII DPR RI Ramson Siagian

usulan anggaran penambahan subsidi bagi pelanggan listrik 900 VA, agar rakyat kecil pelanggan listrik 900 VA jangan terlalu banyak yang dibebankan kepada harga keekonomian,” pungkasnya. ■

(dep.mp) Foto : Jayadi/hr

## Anggaran Terbatas, Komisi VI Harapkan Mitra Kerja Berkinerja Baik

Komisi VI DPR RI secara objektif melihat bahwa politik anggaran belum berubah, komitmen pemerintah dalam menggerakkan sektor riil dirasa masih rendah. Ini tercermin dari alokasi anggaran pada mitra Komisi VI, belum mencukupi kebutuhan untuk bergerak secara maksimal menggerakkan perekonomian.

Ketua Komisi VI Teguh Juwarno menjelaskan pihaknya telah menyetujui Pagu Anggaran empat mitra kerjanya, yaitu Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan

Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Badan Standarisasi Nasional (BSN), dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Menurutnya walaupun dengan alokasi anggaran yang terbatas, diharapkan mitra kerja tetap berkinerja baik.

“Mitra Komisi VI hampir semua adalah sektor yang terkait menggerakkan perekonomian masyarakat. Namun demikian dengan keterbatasan anggaran pemerintah yang dipesankan kepada mitra kerja adalah alokasi anggaran betul-betul dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan peningkatan kinerja,” katanya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/10).



Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno (kanan)

Patut diketahui, Komisi VI telah menyetujui Pagu Anggaran dalam RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebesar Rp 2.046.159.5333.000, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Rp 224.864.020.000, BSN Rp 182.465.697.000, dan KPPU Rp 134.795.052.000.

Teguh membenarkan bahwa mitra kerja Komisi VI ini telah mengajukan usulan penambahan anggaran, tapi setelah disampaikan kepada Badan Anggaran DPR dan Menteri Keuangan, dihadapkan pada anggaran yang sedemikian terbatas. Hal ini disebabkan karena penerimaan negara dari sektor pajak, dan lifting minyak tidak seperti apa yang diharapkan, sehingga terjadi defisit penerimaan negara, dan mau tidak mau harus ditambah dengan berhutang.

“Kita tidak mau ketika berhutang digunakan untuk pengeluaran yang tidak berdampak langsung kepada kinerja dari masing-masing lembaga tersebut. Jadi kami sampaikan usulan tambahan sesudah dilakukan sinkronisasi di Badan Anggaran bahwa harapan mereka untuk ada kenaikan ada tambahan anggaran ini belum bisa dipenuhi pada rencana APBN 2018,” ungkapnya, politisi PAN ini. ■

(as/sc) foto : Naefurroji/hr



# Skema Ganti Rugi Korban First Travel Perlu Dibicarakan

Skema ganti rugi untuk jamaah para korban First Travel perlu segera dibicarakan. Sampai saat ini Komisi VIII DPR RI belum membicarakannya secara khusus dengan pemerintah. Skema ganti rugi bagi jamaah perlu melibatkan banyak pihak, seperti Kemenag, Polri, OJK, dan PPAATK.

**W**akil Ketua Komisi VIII DPR RI Noor Achmad menyampaikan hal itu kepada pers usai memimpin rapat dengar pendapat umum dengan jamaah para korban First Travel di ruang Komisi VIII DPR, Kamis (12/10). Kasus ini belum ada formula solusinya. Sementara jamaah korban First Travel menuntut pemerintah mengambil alih ganti rugi tersebut.

“Kasus ini harus ada formula solusinya. Nanti akan ada pertemuan dengan Polri, PPAATK, OJK, dan Kemenag, supaya ada formulanya yang bisa disampaikan kepada jamaah. Usulan diambil alih pemerintah

itu nanti kita bicarakan dengan tuntas. Kita harapkan regulasi yang akan datang dengan perubahan UU No.13/2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji nanti harus ada jaminannya bagi jamaah. Kalau mereka berumroh atau haji, harus dipastikan bisa berangkat,” tegas Noor.

Skema ganti rugi bagi jamaah juga berlaku bagi kasus jamaah haji yang tidak jadi berangkat. Untuk itu, lanjut politisi Golkar ini, pemerintah dan DPR akan mengawasi mana saja biro travel yang menawarkan biaya termurah dan termahal kepada jamaah. “Jangan sampai biaya termurah dan termahal yang diajukan

biro travel itu malah merugikan jamaah,” ujarnya.

Pada bagian lain, Noor juga menyatakan bahwa usulan jamaah korban agar First Travel tidak dipailitkan mendapat persetujuan Komisi VIII. Bila dipailitkan, otomatis uang jamaah tidak bisa dikembalikan. “Padahal, uang ini belum ketemu seluruhnya. Uang ini masih disimpan di tempat-tempat tertentu. Kalau dipailitkan, jamaah pasti curiga. Kalau sudah dipailitkan nanti bosnya tetap kaya. Itu yang dikhawatirkan jamaah dan kami sepakat itu,” ucap Noor mengakhiri wawancaranya. ■



Komisi VIII DPR Rapat Dengar Pendapat Umum dengan jamaah korban First Travel



Kabag Humas Sekretariat Jenderal dan BK DPR Dadang Prayitna

## Kegiatan DPR Diharapkan Tersosialisasikan Melalui Pameran

Kepala Bagian Humas Sekretariat Jenderal DPR-RI Dadang Prayitna mengharapkan kegiatan kedewanan dapat tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat melalui pameran. Mengingat, tugas dan fungsi DPR belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat.

“Kinerja DPR selama ini masih dikritisi, karena itu kita ingin memberikan gambaran atau pemahaman yang jelas pada masyarakat tentang mekanisme kerja DPR, mulai dari penyerapan aspirasi hingga pengawasan terhadap pemerintah. Itu salah satu tugas DPR yang cukup berat selama ini,” ungkap Dadang saat pembukaan Pameran Legal Expo Kementerian Hukum dan HAM di Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (12/10).

Dadang mengatakan, kegiatan sosialisasi dalam bentuk pameran dinilai sangat efektif. Sebab, peserta pameran dapat memberikan edukasi kepada

pengunjung pameran dengan cara yang berbeda dan tidak membuat jenuh. Didukung pemanfaatan teknologi informasi, edukasi bisa diberikan melalui permainan interaktif seperti fitur DPR Challenge. Menurutnya, fitur ini cukup diminati pengunjung karena menguji seberapa jauh pengetahuan mereka seputar DPR.

Selain itu, pihaknya juga memamerkan produk-produk kehumasan Sekretariat Jenderal seperti Buletin dan Majalah Parlemen. Buletin dan Majalah Parlemen berisikan laporan kegiatan Anggota Dewan yang sedang berlangsung baik dalam masa sidang maupun masa reses. Diharapkan dengan produk-produk tersebut, masyarakat bisa lebih paham dan antusias untuk mengetahui perkembangan

atau kegiatan para wakilnya.

“Kita juga menginformasikan kepada masyarakat mengenai Media Sosial DPR. Masyarakat juga bisa mengetahui informasi yang lengkap tentang DPR melalui website. Apalagi, saat ini kita sedang menuju era parlemen modern, yang mana salah satu indikatornya adalah transparansi dan penggunaan teknologi informasi,” imbuhnya.

Legal Expo 2017 merupakan kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka peringatan Hari Dharma Kharyadika. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan diikuti 35 instansi dari kementerian/lembaga pemerintah maupun swasta serta perguruan tinggi. ■

(mh) foto: azka/hr

(ann,mp) foto: Ojje/hr

# Indeks Korupsi Indonesia Masih Tinggi

Indeks korupsi Indonesia dinilai masih tinggi. Pasca reformasi ini program pemberantasan korupsi jadi pertanyaan Komisi III DPR RI. Walau sudah ada tiga lembaga seperti Polri, Kejaksaan, dan KPK, korupsi tidak menurun.



Foto bersama M. Nasir Djamil dengan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Condro Kirono, Irwasda, Diskrimsum, Kajati, Kepala Pengadilan Tinggi dalam rangka pertemuan Komisi III DPR dengan Kapolda Jawa Tengah di Semarang

**D**emikian mengemuka saat delegasi Komisi III DPR RI menggelar pertemuan di Mapolda Jawa Tengah untuk membahas program pemberantasan korupsi, Jumat (13/10). M. Nasir Djamil yang memimpin delegasi kunjungan kerja spesifik ini mengatakan, Komisi III sangat berkepentingan mengetahui program apa yang sudah dilakukan instansi

penegak hukum di Jawa Tengah dalam memberantas korupsi.

Hadir dalam pertemuan tersebut Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Condro Kirono, Irwasda, Diskrimsum, Kajati, Kepala Pengadilan Tinggi, dan tiga akademisi dari UNDIP, UNTAG, serta UNNES. Menurut Nasir, untuk memberantas korupsi yang dilakukan penguasa harus dilakukan oleh

penguasa pula. "Hanya penguasa yang bisa mengawasi kekuasaan," tegasnya dalam pertemuan tersebut.

Korupsi, sambung Nasir, merupakan kejahatan luar biasa. Untuk itu, perlu penanganan yang luar biasa pula. Sayangnya, walau sudah ada tiga institusi penegak hukum di Indonesia, tren tindak pidana korupsi belum menurun signifikan. Indeks korupsi Indonesia masih kalah dengan Malaysia dan Brunei Darussalam. Dibutuhkan strategi jitu dan koordinasi yang kuat antar tiga lembaga itu untuk memberantas korupsi.

Kapolda Jawa Tengah mengungkapkan, pada tahun 2017 hingga triwulan III ada 40 kasus korupsi yang sudah ditangani dari target 75 kasus atau 53 persen yang terselesaikan. Kerugian negara akibat korupsi di Jawa Tengah pada 2017 mencapai Rp 53.257.866.276. Dari jumlah itu, kerugian negara yang berhasil dikembalikan sebesar Rp 5.951.394.117. Hingga triwulan III 2017, terang Kapolda, ada 89 kasus dalam tahap penyelidikan, 63 kasus penyidikan, dan yang sudah diaudit 83 kasus.

Sementara itu, Kajati dalam penjelasannya di hadapan delegasi Komisi III menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan masih didominasi penyimpangan pengadaan barang dan jasa. Kini, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sedang mengawal anggaran sebesar lebih dari Rp 49 miliar yang masuk tindak pidana korupsi. ■

(mh.mp) foto: husein/hr

## Bekraf Perlu Hadir Kembangkan Tradisi Daerah

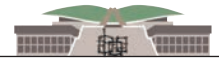
Pempek dan songket merupakan tradisi kearifan lokal dan budaya masyarakat Sumatera Selatan yang sudah ada dan menjadi peninggalan nenek moyang. Anggota Komisi X DPR RI, Sri Meliyana menekankan perlunya kehadiran Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dalam mengembangkan tradisi-tradisi yang ada di daerah. Menurutnya, sampai saat ini peran Bekraf masih belum berkontribusi banyak dalam pengembangan tradisi daerah.

“Pempek itu sumber pendapatan ekonomi kita dari zaman dahulu. Sejak kita masukkan menjadi bagian ekonomi kreatif lebih maju kah pempek kita, lebih enak kah, lebih populerkah, lebih dikenal dan diterima di mana-mana kah. Songket kita apakah lebih baik?” papar Meli sembari bertanya, saat kunjungan kerja guna mendapat masukan dan aspirasi terkait RUU Ekonomi Kreatif (Ekraf) di Griya Agung, Sumsel, Kamis (12/10) sore.

Anggota Dewan dari dapil Sumatera Selatan II ini mengungkapkan, selama belum ada sentuhan dari para pemangku kepentingan dalam mengembangkan tradisi daerah maka belum bisa diklaim sebagai ekonomi kreatif. “Itu tradisional kita saja membuat songket membuat kue, pempek, dan lain-lain itu, tradisional dari zaman dahulu. Tidak bisa dikalim sebagai ekonomi kreatif, itu ekonomi nenek moyang kami sejak kami lahir,” ujarnya.

Menurut Meli, selama ini kontribusi pemangku kepentingan masih minim. Padahal seharusnya masyarakat yang telah melestarikan tradisi daerah mendapatkan apresiasi yang lebih. Masyarakat yang melestarikan tradisi daerah perlu diberikan kepercayaan modal untuk mengembangkan, dan diberi bimbingan dalam memodernkan pengelolaan peninggalan nenek moyang.

Pengembangan industri kreatif dari Palembang, Sumsel harus terus dipacu seiring beragamnya produk dan pelaku usaha muda yang bertambah. Kain songket dan kuliner menjadi produk unggulan dari



# Pungli Rusak Tatanan Masyarakat

Inspektorat Utama (Irtama) DPR RI bekerja sama dengan Satgas Saber Pungli melakukan sosialisasi tentang Unit Pemberantasan Pungli. Dalam diskusi ditekankan bahwa pungli lebih dahsyat, lebih berbahaya daripada korupsi, karena pungli cakupannya bisa lebih luas dan langsung bersentuhan dengan masyarakat. Wakil Sekretaris Satuan Tugas Saber Pungli Pusat Inspektur Jenderal Polisi M Ghufron memaparkan, praktik pungutan liar (pungli) telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.



Suasana rapat sosialisasi unit pemberantasan pungli di Ruang Pansus B

**P**ungli merusak tatanan masyarakat, dengan alasan tersebut maka perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera. Dalam sosialisasi ini, Inspektur II Irtama DPR Ignatius Bambang Rudianto memberikan pengantar tentang definisi pungli. "Kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan secara tidak tertata, tidak berizin, tidak resmi, dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum," jelasnya dalam sambutan pembuka di Gedung Nusantara II, Senin (16/10).

Pungli juga dapat diartikan sebagai kegiatan memungut biaya atau meminta uang secara paksa, kegiatan tersebut merupakan sebuah praktik kejahatan dan pelanggaran pidana. Ghufron memberikan contoh yang sederhana, misalnya pungutan di tempat parkir yang masuk kantong pribadi, dan tidak diatur dalam peraturan yang resmi, sehingga pertanggungjawabannya pun tidak jelas.

Lebih lanjut Ghufron menjabarkan tugas dan fungsi Satgas Saber Pungli. Satgas ini bertugas melaksanakan pemberantasan pungli secara optimal dengan memanfaatkan personal yang ada di kementerian atau lembaga maupun pemerintah daerah. Ada empat fungsi antara lain, intelijen, pencegahan, penindakan, dan yustisi.

"Satgas ini mengemban empat fungsi, ada fungsi penyelidikan, ini dijabat oleh Eselon II dari Badan Intelijen Negara, Satgas Pencegahan dijabat Eselon II dari Kementerian Hukum dan HAM, Pokja Penindakan ini adalah Direktur Pidana Umum Bareskrim Polri, Satuan Pokja Yustisi ini dijabat oleh Wakil Sekertasi dari Kejaksaan Agung," papar Ghufron.

Maka kekuatan Satgas Saber Pungli berasal dari kementerian atau lembaga negara dan pemda, dengan sasaran sentra pelayanan publik di kementerian atau lembaga negara dan pemda pula. ■



Anggota Komisi X DPR Sri Meliyana

kota yang dibelah Sungai Musi ini.

Bumi Sriwijaya memiliki potensi tradisi kuliner, fashion, kria, dan seni pertunjukan yang harus menjadi prioritas pembangunan ekonomi kreatif. Potensi kuliner yang beragam dan unik, diantara Pempek dan Kue Bolu 8 Jam. Di samping itu, terdapat kuliner khas lainnya seperti pindang, lempok, rusip, tempoyak, bekasam. Fashion di Sumsel memiliki potensi pengelolaan tekstil dengan produk antara lain Songket, Jumputan, Blongsong, Tajung, Gebeng, dan Batik Palembang. Adapun kerajinan atau kria khas Sumsel ada perhiasan emas, kerajinan perhiasan perak dan gerabah serta kerajinan rakyat lainnya. ■

(eko/mp) foto:eko/hr

(eko/so) foto:azka/hr

## Ekraf Merupakan Bahan Bakar Ekonomi Nasional



Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menyempatkan berdialog dengan masyarakat

Ekonomi kreatif yang mengedepankan pada ide-ide kreatif dan inovasi serta eksperimen dalam memanfaatkan sumber daya alam, yang kemudian dikapitalisasi untuk memberikan manfaat pada ekonomi dan kepribadian bangsa. Bahkan, ekonomi kreatif dinilai menjadi salah satu bahan bakar ekonomi nasional.

**D**emikian diungkapkan Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih di sela-sela pertemuan dengan pejabat Pemrov Sumatera Barat di Kantor Gubernur Sumatera Barat, Padang, Kamis (12/10). Kunspek ini dalam rangka mendapatkan masukan dan aspirasi terkait RUU Ekonomi Kreatif.

“Provinsi Sumatera Barat dipilih sebagai salah satu tujuan penyerapan aspirasi RUU Ekonomi Kreatif karena mempunyai potensi yang luar biasa di bidang kuliner, fashion, hingga kerajinan tangan yang mempunyai kekhasan, dan tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain. Bahkan tiap daerah di Sumbar memiliki makanan dan jajanan khas,” jelas politisi F-PKS itu saat memberikan sambutan.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi X DPR RI Marlinda Irwanti menambahkan, Indonesia yang terdiri dari 34 provinsi tentu memiliki keunggulan potensial ekonomi kreatif yang berdasar dari kearifan lokal di daerah masing-masing yang belum tergali secara lebih dalam lagi.

“Untuk itu, negara harus segera hadir untuk membantu menemukan, memfasilitasi dan melindungi UKM-UKM kita dari gempuran ekonomi global yang makin mendesak dan mematikan ekonomi lokal kita saat ini,” tegas politisi F-PG itu.

Pernyataan itu pun diperkuat oleh Anggota Komisi X DPR RI Reni Marlinawati. Reni menjelaskan, DPR bersama Pemerintah sedang berusaha

# RUU Ekraf Untuk Payungi Kreativitas

mencari berbagai masukan dari berbagai pemangku kepentingan, khususnya terkait substansi mengenai ekosistem ekonomi kreatif yang terdiri dari ruang lingkup ekonomi kreatif, klasifikasi dan jenis ekonomi kreatif, SDM Ekraf, pembiayaan dan kemitraan, serta kelembagaan.

Apalagi, masih kata Reni, amanat Rencana Pemerintah Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJPMN) 2015-2019 bahwa pertumbuhan PDB ekonomi kreatif, serapan tenaga kerja, serta kontribusi atau devisa ekspor untuk ditingkatkan.

“Ketiga sasaran tersebut ditargetkan dapat dicapai dengan rata-rata pertumbuhan setiap tahun sebesar 11 persen untuk PDB, 2 persen untuk tenaga kerja dan 12 persen untuk kontribusi ekspor,” imbuh politisi F-PPP itu.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Sumatera Barat Ali Asmar menyampaikan bahwa Gubernur Sumatera Barat mempunyai resep jitu dalam merangsang ritme roda perekonomian lokal. Hal itu ditunjukkan dengan tidak dikeluarkannya izin untuk usaha minimarket yang kian menjamur di daerah lain, karena akan membunuh pertumbuhan pedagang lokal.

Angga Djamar, salah satu penggiat ekonomi kreatif di Sumbar dengan produk ‘Ladang Tari Nan Jombang’, mengatakan kehadiran pemerintah maupun pihak-pihak

yang terkait dengan para pelaku industri kreatif harus menciptakan sinergi dan ekosistem yang membantu eksistensi dan keberlangsungan UKM secara terus menerus, baik secara permodalan ataupun secara pemasaran.

“Peraturan apapun yang akan dibuat pada akhirnya nanti hanya pihak-pihak tertentu yang akan diuntungkan. Para penggiat industri kreatif mengharapkan adanya *fair support* dari pemerintah sehingga tercipta distribusi pendampingan dan ekosistem yang kuat dari pihak manapun yang sama-sama peduli untuk memajukan usaha industri ekonomi kreatif ini,” jelasnya. ■

(gud, sf, mp) foto: guntur/hr

Komisi X DPR RI mengklarifikasi soal Rancangan Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif (RUU Ekraf), lantaran sebagian kalangan menilai Indonesia tidak memerlukan RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019 itu.

“Jangan salah, RUU ini kita buat dan disusun untuk memayungi. Bukan membatasi, sebab kreativitas tidak bisa dibatasi,” ujar Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjiyanto saat pertemuan dengan Walikota Solo, F.X. Hadi Rudyanto berserta jajarannya, di Balai Kota Solo, baru-baru ini.

Solo merupakan salah satu kota yang sangat punya kepentingan dengan RUU ini. Menurutnya, Solo sebagai salah satu kota yang sukses mendorong pertumbuhan Ekraf. Hal ini didukung dengan banyaknya pelaku Ekraf yang tumbuh di Bengawan ini.

“Apalagi pertemuan ini dihadiri oleh akademisi, pelaku, dan dari unsur Pemda sehingga hampir semua terwakili. Oleh karena itu, masukan dari pertemuan hari ini sangat-sangat kita butuhkan,” ujar Djoko.

Djoko- sapaan akrab politisi Partai Demokrat menyebutkan, RUU Ekraf nantinya akan disusun secara komprehensif. Menurutnya, bukannya membatasi kreativitas pelakunya. RUU ini akan mengatur soal skema permodalan, perkreditan hingga pemasaran bagi pelaku usaha di

sektor ekonomi kreatif. “Kemudahan-kemudahan akan kita berikan. Persyaratan kredit harus sesederhana mungkin,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, dari berbagai pertemuan tim penyusun RUU Ekraf termasuk dengan pihak perbankan, perfoma kredit para pelaku Ekraf ternyata sangat bagus. Artinya, kemampuan dan kemauan mereka untuk membayar tergolong tinggi. “Ini menandakan bahwa pengusaha-pengusaha kecil itu justru bertanggung jawab terhadap kewajiban-kewajiban hutangnya kepada pihak perbankan,” jelasnya.

Politisi asal Dapil Jateng III ini juga mengatakan, akan mengakomodasi masukan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo agar pengusaha kecil bisa berkiper dalam proyek-proyek pemerintah. “Oleh karena itu, masukan-masukan yang diterima dalam pertemuan ini nantinya akan menjadi bahan Komisi X DPR untuk menyusun RUU tentang Ekraf. Selain Pemkot Solo, tim penyusun RUU Ekraf juga sudah menggali masukan-masukan dari berbagai lembaga terkait seperti Badan Ekonomi Kreatif (Berkaf) dan kota-kota lainnya.

Sementara Walikota Solo, F.X. Hadi Rudyanto mengatakan, pernah merasa kesal lantaran regulasi tidak memberi kesempatan bagi pengusaha kecil dan menengah untuk mengikuti proyek-proyek pengadaan barang maupun jasa dari pemerintah. “Karena harus lelang. Padahal mereka tidak memenuhi kualifikasi untuk ikut lelang,” ungkap Walikota Solo menambahkan. ■

(w, mp), foto: iwan armanias/hr



Ketua Komisi X DPR Djoko Udjiyanto saat meninjau pelaku Ekonomi Kreatif.



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hafisz Tohir

## Komisi XI Minta Penguatan Konsorsium BUMN Karya

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI yang juga Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi XI ke Provinsi Sumatera Selatan Hafisz Tohir meminta penguatan Perbankan Indonesia, khususnya pada konsorsium BUMN Karya yang saat ini masih memiliki modal sangat kecil.

**H**al itu diungkapkannya saat melakukan rapat dengar pendapat dengan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, PT. Utama Karya, PT. Waskita Karya, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) terkait pengawasan APBN di BUMN yang mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN), khususnya PT. SMI dan LMAN atas pembangunan Jalan Tol Palembang-Indralaya yang memiliki panjang keseluruhan 21,39 km dan perkembangan pembangunan Venue Asian Games di Jakabaring Sport City yang dibiayai APBN sebesar Rp 68 triliun.

Hafisz mengapresiasi kinerja para

*stakeholder* terkait dalam menyelesaikan beberapa pembangunan infrastruktur di Sumatera Selatan. Menurutnya sudah cukup optimal, namun ia menilai, perlu ada penguatan perbankan Indonesia.

“Konsorsium BUMN Karya kita itu modalnya masih kecil sekali, karena itu, harus kita pikirkan ke depan, bagaimana menggarap infrastruktur ini. Tetapi tidak mengharuskan kita mengikutsertakan PMN yang diserahkan pada BUMN tersebut, karena APBN kita sangat terbatas,” papar politisi PAN ini di Palembang, Senin (16/10/17).

Ditambahkan Hafisz, bahwa setiap rupiah yang di serahkan ke PMN tersebut adalah terhitung utang negara. Maka dari

itu, harus disiasati dengan aset finansial.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Alex Noerdin mengaku sangat bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan seluruh pembangunan infrastruktur yang ada saat ini. Menurutnya, pembangunan Jakabaring Sport Center dan LRT merupakan pembangunan sarana olah raga terbesar dan berstandar internasional juga nyaman bagi atlet yang nantinya akan bertanding di April 2018 mendatang.

Sebagaimana diketahui, Komisi XI DPR RI merupakan salah satu alat kelengkapan DPR RI yang mempunyai ruang lingkup tugas di bidang Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Perbankan dan Lembaga Keuangan Non Bank.

Mengacu pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2015, anggaran PMN terealisasi sebesar Rp 71,93 triliun. Tahun 2016 anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 65,18 triliun. Komisi XI berkepentingan untuk melakukan pendalaman terhadap kinerja BUMN yang menerima tambahan PMN tersebut. Hal ini sesuai dengan tugas Komisi XI dalam fungsi pengawasan.

Sebagaimana diketahui, Proyek LRT Palembang sepanjang 23,4 km dikerjakan oleh PT. Waskita Karya mulai Oktober 2015 dengan nilai total kontrak proyek tersebut Rp 12,59 triliun yang diharapkan dapat mendukung kelengkapan infrastruktur yang akan digunakan selama Asian Games 2018 dan dapat mempermudah mobilisasi masyarakat Palembang dan sekitarnya dengan moda transportasi yang lebih nyaman dan terjangkau.

Lebih dari itu, Komisi XI dalam kunjungan ini berharap mendapatkan gambaran tentang upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target yang sudah ditetapkan dan kendala-kendala yang dihadapi PT. SMI dan LMAN dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan demikian, apabila terdapat masalah-masalah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Komisi XI dapat menindaklanjuti dalam Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan.

Di Sumatera Selatan, Hafisz didampingi anggota Komisi XI antara lain Andreas Eddy Susetyo (F-PDIP), Sarmuji, Edison Betaubun (F-Golkar), Kardaya Warnika, Heri Gunawan (F-Gerindra), Rudi Hartono (F-PD), Sukiman (F-PAN), Bertu Merlas (F-PKB), Junaidy Auly (F-PKS), dan Anarulita Mughtar (F-Nasdem). ■

(ndy/isc) foto : Nadiyah



## Komisi II Undang Sejumlah Pakar Bahas Perppu Ormas

Ada kontroversi yang terjadi terkait dikeluarkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Ormas ditengah-tengah masyarakat, yakni ada pihak yang menerima dan ada pihak yang menolak, dan ada juga yang ditengah-tengah.



Komisi II DPR RDPU dengan Pakar Hukum bahas Perppu Ormas

**K**etua Komisi II DPR RI Zainudin Amali mengatakan, dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang digelar Rabu (18/10) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Komisi II mengundang para ahli dan pakar hukum yakni Profesor Azyumardi Azra, Profesor Yusril Ihza Mahendra, DR. Irman Putra Sidin, DR. Refli Harun, dan DR. Fitra Arsil.

“Tujuan mengundang para ahli dan pakar hukum tersebut adalah karena Komisi II DPR ingin meyakinkan kepada masyarakat, khususnya kepada fraksi-

fraksi bahwa walaupun pendapat akhirnya disepakati atau ditolak oleh DPR, itu adalah hasil dari masukan dari berbagai pihak,” jelas Zainudin Amali.

Ia juga mengatakan, Komisi II telah berkeliling ke berbagai daerah, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, yang menurutnya hal itu merupakan representasi dari jumlah penduduk yang besar, dan juga berbagai ragam yang ada di tiga provinsi itu.

“Itulah sebabnya kami berkunjung kesana dan telah mendapatkan masukan. Nanti tinggal terserah kepada fraksi-fraksi tentang masukan yang mereka dapatkan

dari berbagai pihak itu akan seperti apa ujungnya,” ujarnya.

Politisi Golkar ini menyatakan bahwa pembahasan Perppu berbeda dengan pembahasan Undang-Undang. Di Perppu Komisi II hanya punya dua pilihan yaitu menerima atau menolak. Sehingga sebelum memutuskan untuk menerima atau menolak itulah Komisi II DPR mengundang berbagai pihak, ormas, pakar, dan akademisi ataupun tokoh masyarakat yang dianggap bisa memberikan pikiran dan pendapatnya untuk Perppu tersebut.

Sehingga masukan kepada fraksi-fraksi akan menjadi lengkap, dan tidak dianggap sebagai semata-mata sebagai keinginan DPR atau fraksi-fraksi saja. “Kita akan semaksimal mungkin. Dengan waktu yang ada, kita akan gunakan untuk mendengarkan berbagai masukan itu,” tandasnya.

Kalau nantinya fraksi-fraksi di Komisi II masih berbeda pandangan dan pendapatnya, maka tentu harus diputuskan dalam rapat Paripurna. “Tetapi kalau di Komisi II sudah mendapatkan kata sepakat, baik menerima ataupun menolak, maka tentu saya sebagai Ketua Komisi akan melaporkan hasilnya ke Paripurna,” pungkasnya. ■

(dep.mp) Foto : Jayihr



Bagian Penerbitan, Biro Pemberitaan Setjen dan BK DPR RI melakukan pertemuan dengan Humas RS Fatmawati terkait permohonan izin penempatan rak display Majalah dan Buletin Parlemen (Kamis, 15/10)



Rapat Paripurna DPR RI pengesahan tujuh Komisioner Komnas HAM, Selasa (17/10). foto:Andri/DN



Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR berdialog dengan Panglima TNI, sesaat sebelum rapat kerja pembahasan anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI tahun 2018. foto: runi/DN



Ketua DPR Setya Novanto didampingi Deputy Administrasi dan Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi meninjau pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dalam rangka Penerimaan CPNS di Lingkungan Setjen dan BK DPR RI, Sabtu (14/10) foto:singgih/DN